



RENJA

2023

**Rencana
Kerja**

Perubahan

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat**



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 675 /BAPPEDA/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

+

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

f

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175;
20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok BARAT tahun 2022 Nomor 35);

21. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 44);

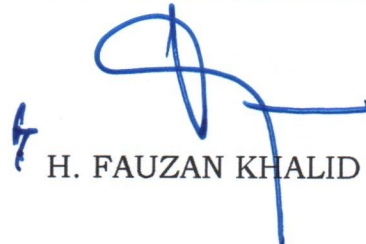
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 merupakan pedoman dan rujukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2023;
 - c. Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI LOMBOK BARAT



H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 675 / BAPPEDA /2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2023

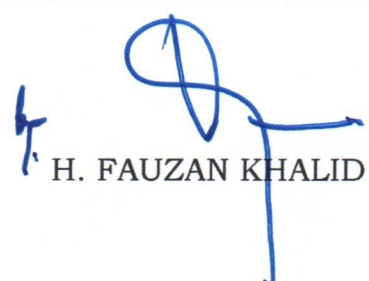
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT
4.	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
9.	DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT
10.	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LOMBOK BARAT
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT
14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT
15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LOMBOK BARAT
16.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
17.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK BARAT
18.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
20.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK BARAT

f

NO.	PERANGKAT DAERAH
21.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
22.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
23.	DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT
24.	DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
25.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
26.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
27.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
28.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
29.	BADAN PENDAPATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
30.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
31.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LOMBOK BARAT
32.	INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT
33.	KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT
34.	KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT
35.	KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
36.	KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
37.	KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
38.	KECAMATAN KURIPAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
39.	KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT
40.	KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT
41.	KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT
42.	KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan Rahmat-Nya, maka penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini sebagai bentuk dari penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan arah pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

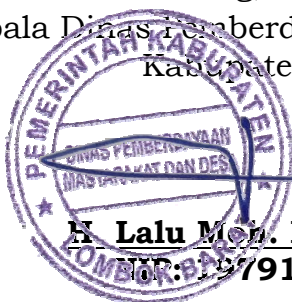
Selanjutnya Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat.

Dalam penyusunan Dokumen Renja Perubahan DPMD Kabupaten Lombok Barat ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang terkait dengan penyempurnaan dokumen ini sangat diharapkan sehingga dokumen ini benar-benar dapat dijadikan acuan pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja Perubahan ini.

Gerung, Agustus 2023.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat



H. Lalu Mon. Hakam, S.STP, M.Si
NIP: 197912121998101003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	8
2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun 2024	8
2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	27
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.....	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V PENUTUP.....	42
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	2
Gambar 1.2	Tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD.....	3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2023	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Lombok Barat	16
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lombok Barat	19
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Masyarakat di DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023.....	28
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023.....	33
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, DPMD Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendukung tugas Bupati Lombok Barat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, DPMD memerlukan suatu perencanaan.

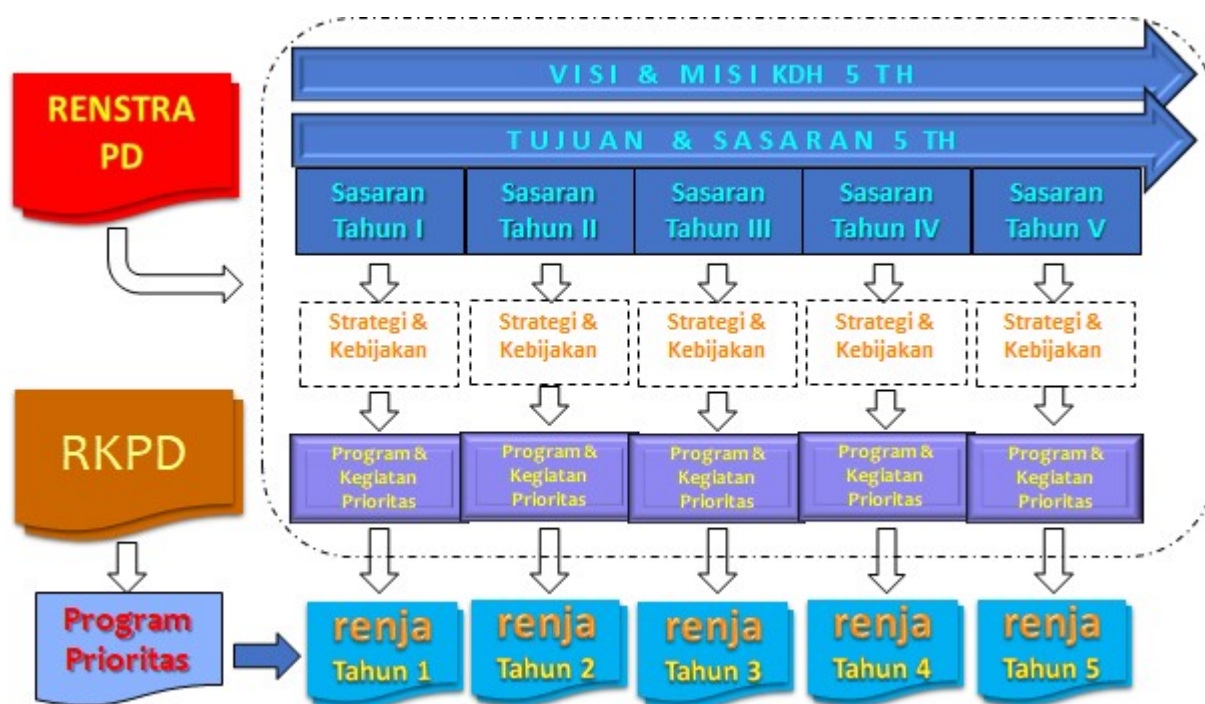
Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana, dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, diselenggarakan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang

menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselenggarakan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Keterkaitan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya tersaji pada gambar berikut.

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



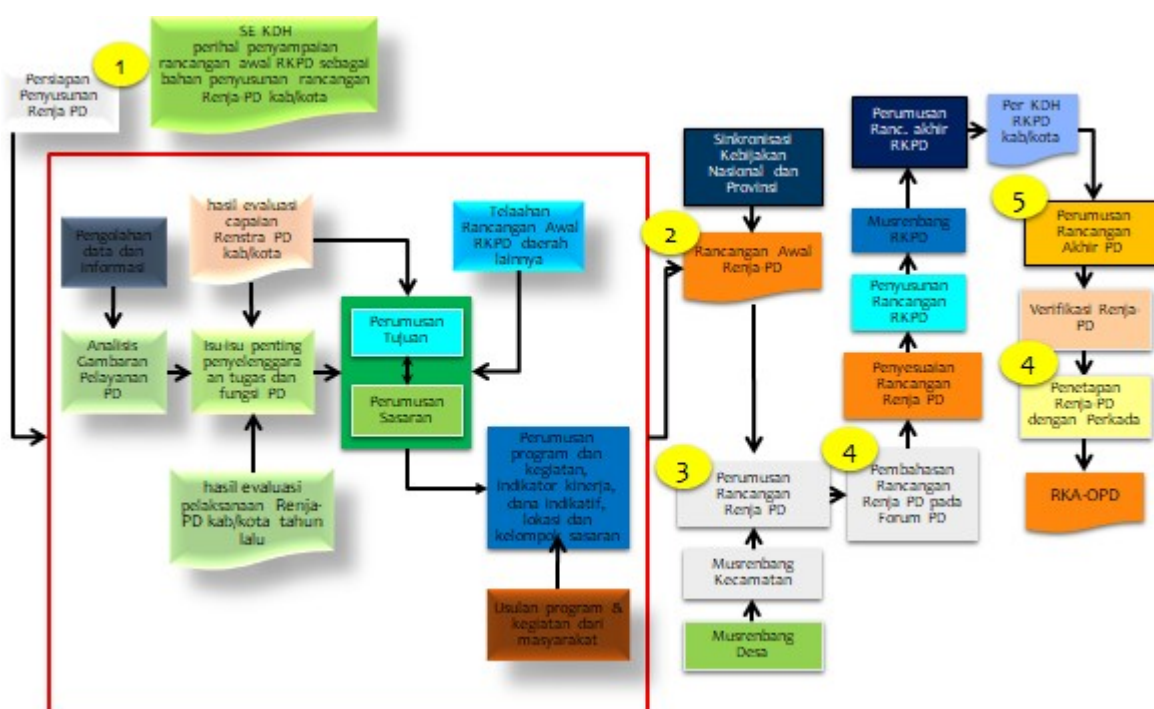
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan Pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan Pencapaian sasaran pembangunan nasional. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah memperhatikan dinamika yang ada, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 2 Tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD



1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 landasan hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 130);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169);
17. Peraturan Bupati No. 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat
18. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 188.45/675/BAPPEDA/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat di Tahun 2023 setelah disesuaikan dengan kondisi yang ada melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 ini adalah : menyiapkan dokumen kinerja tahunan yang operasional :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat di tahun 2023 yang telah disesuaikan

2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan ditugaskan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta Program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik data dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Sebagai evaluasi, pada bagian ini dijelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 serta capaian Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022.

Evaluasi terhadap Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program / kegiatan, pelaksanaan rencana program / kegiatan serta hasil rencana program / kegiatan.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Perkiraan Capaian Tahun 2023

Penyusunan Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 , memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan perubahan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Berikut pada Tabel 2.1 disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 Kabupaten Lombok Barat

Sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja DPMD Kabupaten Lombok Barat mencapai Rp 2.066.467.042 (47,30%) dari total pagu Rp. 4.368.906.226. Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana anggaran kas, namun agak tersendat karena adanya kebijakan pembatasan pencairan oleh pengelola keuangan daerah. Untuk capaian kinerja, pada sebagian sub kegiatan seperti :

- Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Baru bisa didapatkan hasilnya pada akhir tahun sehingga belum dapat ditampilkan. Untuk sub kegiatan lainnya, terutama sub kegiatan kesekretariatan capaian target sesuai dengan rencana. Pada sub kegiatan yang tidak didanai karena keterbatasan anggaran, target kinerjanya tidak dihitung.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat memiliki tugas yaitu :

"Memimpin, mengatur merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya".

Serta fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana strategis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan desa, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemberdayaan ekonomi masyarakat
- d. Pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tennis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat No. 800/512/DPMD/2021 Tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Penanggung jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP Perangkat Daerah		Angka	DPMD	Penilaian Inspektorat
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase tindak lanjut hasil rewiu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Hasil Reviu}}{\text{Tindak Lanjut Hasil Reviu}} \times 100\%$	Persen	DPMD	DPMD
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah		Angka	DPMD	http://ikm.lombokbarat.kab.go.id/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatnya pembangunan desa di dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan	Jumlah Desa Mandiri	Data dari 54 indikator dengan skor (0-5) sesuai tingkat keberartian kemudian dirumuskan menjadi 3 indeks yaitu Indeks Sosial (IS), Indeks Ekonomi (IE) dan Indeks Lingkungan (IL) lalu dihitung menjadi Indeks Desa Membangun dengan Rumus IDM = 1/3 (IS+IE+IL) Dari IDM yang dimiliki diketahui status kemajuan dan kemandirian desa, sehingga bisa diketahui jumlah desa mandiri	Desa	DPMD	DPMD (Sesuai dengan Permendes a PDTT No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun)

Indikator Kinerja Utama sesuai tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat adalah Jumlah Desa Mandiri. Pada Tahun 2022 jumlah Mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Mandiri (IDM) sebanyak 10 desa. Jadi target Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022 telah tercapai. Hal tersebut disebabkan antara lain karena adanya koordinasi yang baik di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan perangkat daerah lain ataupun pemerintah desa. Selain itu adanya pembinaan yang berkesinambungan juga merupakan faktor pendukung yang menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut

Kebijakan yang diambil adalah terus meningkatkan koordinasi serta pembinaan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Capaian hasil pelaksanaan Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat adalah seperti yang ditunjukkan pada table 2.1 diatas pada sub-bab 2.1.1. Dalam penyusunan Renja Perubahan DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Pada Rencana Kerja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023, terdapat 5 Program, 11 kegiatan dan 60 sub kegiatan sedangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMD Kabupaten Lombok Barat terdapat 4 Program, 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Jadi dari 60 sub kegiatan yang direncanakan pada Renja SKPD, hanya 22 sub kegiatan yang terakomodir (36.67%).

Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang disediakan. Sehubungan dengan hal diatas, koordinasi pengelolaan program / kegiatan dan pembinaan SDM pada DPMD harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Renja DPMD tahun 2023 dapat tercapai. Selain itu pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 direncanakan untuk dapat dilaksanakan 2 sub kegiatan tambahan lagi yaitu :

- 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peran serta DPMD dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan menuju desa mandiri harus selalu ditingkatkan. Untuk itu dalam rangka pengembangan pelayanan DPMD terhadap masyarakat, DPMD akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program / kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu

bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPMD Kabupaten Lombok Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dalam hal ini DPMD Kabupaten Lombok Barat sampai dengan Tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Lombok Barat

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pada Awal periode RPJMD (Tahun 2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	IKM OPD	Belum dihitung	77	86,3	87,6	88,8	90,1	79	87,08	87,03	88,8	
2	Nilai AKIP DPMD	85,53	81	85,7	85,9	86,3	86,5	85,53	85,73	85,86	86,3	
3	Persentase tindak lanjut hasil revidi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	Belum menjadi IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jumlah Desa Mandiri	0	Belum menjadi IKU	6	9	12	14	4	6	10	12	

Untuk indikator Persentase tindak lanjut hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Jumlah Desa Mandiri, sampai dengan Tahun 2020 belum menjadi indikator sehingga tidak memiliki target, tetapi data yang diinginkan telah tersedia. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari survey melalui website yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Indikator Nilai AKIP OPD, didapat dari penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat yang disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. DPMD Kabupaten Lombok Barat. Indikator Persentase tindak lanjut hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah didapat dari membagi tindak lanjut hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Untuk indikator Jumlah Desa Mandiri yang merupakan Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Lombok Barat sesuai tugas fungsinya, didapatkan Data dari 54 indikator dengan skor (0-5) sesuai tingkat keberartian kemudian dirumuskan menjadi 3 indeks yaitu Indeks Sosial (IS), Indeks Ekonomi (IE) dan Indeks Lingkungan (IL) lalu dihitung menjadi Indeks Desa Membangun dengan Rumus

$$IDM = 1/3 (IS+IE+IL)$$

Dari IDM yang dimiliki diketahui status kemajuan dan kemandirian desa, sehingga bisa diketahui jumlah desa mandiri. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 telah tercapai. Hal tersebut disebabkan antara lain karena adanya koordinasi yang baik di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan perangkat daerah lain ataupun pemerintah desa. Selain itu adanya pembinaan yang berkesinambungan yang menunjang laju perkembangan desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPMD Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berhubungan sangat erat dengan desa. Isu yang sangat krusial terkait dengan hal tersebut adalah ditetapkannya undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang desa beserta aturan-aturan

turunannya. Untuk mencapai target indikator pelayanan perangkat daerah, harus ditingkatkan Meningkatnya pembangunan desa di dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan sesuai dengan isu tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Masih tingginya ketergantungan desa pada dana transfer dari pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan di desa
- Besarnya keinginan masyarakat desa untuk memekarkan desanya

Masih tingginya ketergantungan desa pada dana transfer dari pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan di desa menggambarkan antara lain, masih rendahnya pendapatan asli desa, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa yang juga dapat berarti belum optimalnya peran lembaga-lembaga di desa serta belum terlaksananya kerja sama antar desa.

Sedangkan Besarnya keinginan masyarakat desa untuk memekarkan desanya, dapat disebabkan antara lain oleh belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat, belum meratanya fasilitas, sarana prasarana dan penataan desa serta belum optimalnya pengembangan potensi desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD menunjukkan program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan analisa kebutuhan berdasar kepada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta telaahan terhadap usulan program dan kegiatan oleh masyarakat melalui Musrenbang. Namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi dan refocusing, anggaran yang dapat dipergunakan sangat sedikit sehingga harus mempergunakan skala prioritas dan penyesuaian dengan kondisi dan kebijakan pimpinan. Hasil review disajikan pada tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023
Kabupaten Lombok Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa					4.368.906.226,00					4.468.778.962,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 Persen	3.379.074.998,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 Persen	3.305.847.734,00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Perencanaan	100 Persen	6.677.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Perencanaan	100 Persen	6.677.500,00		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.302.875,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.302.875,00		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gerung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gerung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000,00		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.582.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.582.000,00		
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.042.625,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.042.625,00		
6	Penataan Organisasi					Penataan Organisasi						
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Bukan merupakan sub. Kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	3.054.810.259,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	2.939.682.995,00	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang	3.022.783.859,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang	2.907.656.595,00	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gerung	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 Dokumen	30.565.375,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gerung	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 Dokumen	30.565.375,00	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.461.025,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.461.025,00	
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	3.935.650,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	3.944.650,00	
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Gerung	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Gerung	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 Paket	0,00	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Gerung	Pegawai Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Paket	0,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Gerung	Pegawai Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Paket	0,00	
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gerung	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Paket	0,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gerung	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Paket	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gerung	Jumlah dokumenPendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	2.545.325,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gerung	Jumlah dokumenPendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	2.554.325,00	
16	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Gerung	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	1.390.325,00	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Gerung	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	1.390.325,00	
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	34.318.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	35.563.000,00	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gerung	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1.000 Dokumen	3.720.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gerung	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1.000 Dokumen	3.720.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gerung	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	2.970.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gerung	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	4.215.000,00	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	27.628.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	27.628.000,00	
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		12.150.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		31.661.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gerung	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit	12.150.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gerung	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit	31.661.000,00	
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gerung	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gerung	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 unit	0,00	
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gerung	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gerung	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gerung	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	149.043.089,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gerung	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	149.043.089,00	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.055.825,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.055.825,00	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	36.133.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	36.133.500,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	111.853.764,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gerung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	111.853.764,00	
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gerung	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Jasa Pemeliharaan BMD	100 persen	118.140.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gerung	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Jasa Pemeliharaan BMD	100 persen	139.275.500,00	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gerung	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	26 Unit	95.200.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gerung	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	26 Unit	95.200.000,00	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gerung	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	2 Unit	17.537.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gerung	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	2 Unit	17.537.000,00	
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gerung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 unit	5.403.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gerung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 unit	26.538.500,00	
30	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase desa baru yang telah mendapat kode desa	88 persen	199.999.828,00	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase desa baru yang telah mendapat kode desa	88 persen	199.999.828,00	
31	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah desa yang telah ditata sesuai dengan regulasi yang berlaku	105 Desa	199.999.828,00	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah desa yang telah ditata sesuai dengan regulasi yang berlaku	105 Desa	199.999.828,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Kecamatan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	8 desa	199.999.828,00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Kecamatan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	8 desa	199.999.828,00	
33	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	10 Kecamatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 desa	0,00	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	10 Kecamatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 desa	0,00	Karena keterbatasan anggaran belum menjadi prioritas
34	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10 Kecamatan	Jumlah desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	119 desa	0,00	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10 Kecamatan	Jumlah desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	119 desa	0,00	
35	Penamaan dan Kode Desa	10 Kecamatan	Jumlah desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0 desa	0,00	Penamaan dan Kode Desa	10 Kecamatan	Jumlah desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0 desa	0,00	Karena keterbatasan anggaran belum menjadi prioritas
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota	0 laporan	0,00	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota	0 laporan	0,00	Karena keterbatasan anggaran belum menjadi prioritas
36	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	10 Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	11 unit	0,00	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	10 Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	11 unit	0,00	
37	<u>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</u>		Persentase desa yang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka kerja sama desa	15 persen	0,00	<u>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</u>		Persentase desa yang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka kerja sama desa	15 persen	0,00	
38	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah seluruh kegiatan dalam rangka melakukan kerja sama yang dapat terlaksana	7 kegiatan	0,00	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah seluruh kegiatan dalam rangka melakukan kerja sama yang dapat terlaksana	7 kegiatan	0,00	
39	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0 dokumen	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	0 dokumen	0,00	
41	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10 Kecamatan	Jumlah dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	0,00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10 Kecamatan	Jumlah dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	0,00	Karena keterbatasan anggaran belum menjadi prioritas
42	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu	75 Persen	300.000.000,00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu	75 Persen	298.100.000,00	
43	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu	119 desa	300.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu	119 desa	298.100.000,00	
44	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0 dokumen	0,00	
45	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	0 dokumen	0,00	
46	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0 dokumen	0,00	
47	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	119 desa	Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	119 desa	Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	0 dokumen	0,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	10 Kecamatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 orang	0,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	10 Kecamatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	686 orang	40.000.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	10 Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 laporan	0,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	10 Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 laporan	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	0 dokumen	0,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	0 dokumen	0,00	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	18 Desa	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	18 laporan	300.000.000,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	18 Desa	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	18 laporan	258.100.000,00	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0 dokumen	0,00	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 dokumen	0,00	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 dokumen	0,00	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Kecamatan	Jumlah laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 laporan	0,00	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Kecamatan	Jumlah laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 laporan	0,00	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen profil desa	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen profil desa	0 dokumen	0,00	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	0 dokumen	0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa	0 dokumen	0,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	10 Kecamatan	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 orang	0,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	10 Kecamatan	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 orang	0,00	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 desa	0,00	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 desa	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 laporan	0,00	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 laporan	0,00	
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	0 dokumen	0,00	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	0 dokumen	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		persentase anggaran pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat pada APBDes	1,5 Persen	489.831.400,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		persentase anggaran pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat pada APBDes	1,5 Persen	664.831.400,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan atau Masyarakat Hukum Adat yang telah dibina dan atau dilatih	90 lembaga	489.831.400,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan atau Masyarakat Hukum Adat yang telah dibina dan atau dilatih	90 lembaga	664.831.400,00	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	25.000.000,00	Karena keterbatasan anggaran belum menjadi prioritas
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 unit	0,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 unit	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0 dokumen	0,00	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 laporan	0,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 laporan	0,00	
	Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0 dokumen	0,00	Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0 dokumen	0,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	0 lembaga	0,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	0 lembaga	0,00	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0 laporan	0,00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0 laporan	0,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0 dokumen	0,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0 dokumen	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	489.831.400,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	639.831.400,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022, usulan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat yang akan diajukan ke Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- Pembinaan Posyandu
- Pembinaan Aparatur Desa
- Pembinaan BUMDes

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah menjadi bagian dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2023 pada sub kegiatan :

- 2.13.05.2.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Rekapitulasi usulan masyarakat disajikan pada Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Masyarakat di DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023.

Namun pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran murni Tahun Anggaran 2023 semua sub kegiatan tersebut tidak dapat didanai karena adanya prioritas yang lebih tinggi seperti pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak serta kebijakan pimpinan. Pada pelaksanaannya untuk pembinaan aparatur desa dan BUMDes disinergikan dengan kegiatan “Pemda Menyapa Desa” dengan harapan desa dan BUMDes yang membutuhkan pembinaan lebih proaktif. Untuk Rencana Kerja perubahan Tahun Anggaran 2023, pendekatan yang dilakukan masih sama, dengan tambahan pemberian anggaran pada sub kegiatan 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	<p>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <p>2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.13.05.2.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	Karang Bayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	
2	<p>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p> <p>2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p>	Kuranji	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
3	<p>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p> <p>2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p>	Langko	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	
4	<p>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <p>2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.13.05.2.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	Batu Layar Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
5	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Mareje	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	1 lembaga	
6	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Babussalam	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi yang dalam tugas dan fungsinya terkait langsung dengan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Lombok Barat dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 telah menetapkan untuk focus pada tujuan “Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan” dengan sasaran strategis “Berkembangnya status pembangunan desa)”, “Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan” dan “Menurunnya Kemiskinan di perdesaan” Penjabaran lebih rinci atas sasaran strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya status perkembangan desa, dengan indikator:
 - a. Meningkatnya status desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 5000 Desa;
 - b. Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 10000 Desa.
2. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan, dengan indikator:
 - a. Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional).
 - b. Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian.
3. Menurunnya Kemiskinan di perdesaan, dengan target indikator Persentase kemiskinan di perdesaan pada akhir RPJM menjadi sebesar 9,90 %

Untuk mencapai sasaran strategis yang sudah disusun, telah ditetapkan arah kebijakan di dalamnya. Hal itu dimaksud agar dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tidak keluar dari konteks sasaran strategis. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah:

1. Mengarusutamakan pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)
2. Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan
3. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital
4. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan
5. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.
6. Peningkatan sinergitas pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.
7. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

Gambaran mengenai Sasaran strategis Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan di atas telah diterjemahkan ke berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPMD Kabupaten Lombok Barat, tentunya disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan didalam Renja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 sudah sejalan dan sinkron dengan kebijakan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan misi kepala daerah terpilih yaitu misi pertama, **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki Integritas** dan misi ketiga, **Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat** sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki Integritas		
No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai AKIP
Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat		
1	Meningkat serta semakin meratanya keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Meningkatnya perkembangan di bidang pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Perubahan anggaran Tahun 2023 DPMD Kabupaten Lombok Barat merencanakan untuk melaksanakan 3 program prioritas dengan 3 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Untuk 4 program dengan 4 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 1.048.021.728,00 (Satu Milyar Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Seluruh kegiatan memiliki lokasi sasaran di seluruh desa dan kecamatan. Dengan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas fungsi adalah “Jumlah Desa Mandiri” maka harus terlaksana meningkatnya pembangunan desa di dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan, sehingga pada dasarnya program kegiatan dan sub kegiatan prioritas di DPMD Kabupaten Lombok Barat adalah semua program kegiatan dan sub kegiatan non rutin. Karena semua kegiatan tersebut berpengaruh pada pencapaian Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai.

Rincian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 DPMD Kabupaten Lombok Barat disajikan pada Tabel 3.1

TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DPMD KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa baru yang telah mendapat kode desa		88 persen	199.999.828,00	DAU		100 persen	124.781.700,00
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang telah ditata sesuai dengan regulasi yang berlaku		105 Desa	199.999.828,00	DAU		119 Desa	124.781.700,00
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Kecamatan	8 desa	199.999.828,00	DAU		8 desa	51.275.500,00
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Kecamatan	0 desa	0,00	DAU		119 desa	13.506.200,00
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10 Kecamatan	119 desa	0,00	DAU		119 desa	15.000.000,00
	Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	10 Kecamatan	0 desa	0,00	DAU		11 desa	15.000.000,00
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		1 laporan	15.000.000,00
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	10 Kecamatan	11 unit	0,00	DAU		11 unit	15.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka kerja sama desa		15 persen	0,00	DAU		17,5 persen	42.335.700,00
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah seluruh kegiatan dalam rangka melakukan kerja sama yang dapat terlaksana		7 kegiatan	0,00	DAU		9 kegiatan	42.335.700,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	12.335.700,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10 Kecamatan	1 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu		75 Persen	183.190.500,00	DAU		80 Persen	1.128.588.153,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu		119 desa	183.190.500,00	DAU		119 desa	1.128.588.153,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	11.255.200,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		119 dokumen	6.753.100,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		119 dokumen	27.278.100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	119 desa	0 dokumen	0,00	DAU		119 dokumen	123.826.400,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Kecamatan	1777 orang	40.000.000,00	DAU		1777 orang	234.198.300,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		119 laporan	5.211.200,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		119 dokumen	9.116.700,00
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	24 Desa	18 laporan	258.100.000,00	DAU		18 laporan	379.063.400,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	196.885.753,00
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00			1 dokumen	15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		1 laporan	15.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		119 dokumen	15.000.000,00
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Kecamatan	0 orang	0,00	DAU		27 orang	15.000.000,00
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Kecamatan	0 desa	0,00	DAU		1 desa	15.000.000,00
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		1 laporan	15.000.000,00
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase anggaran pemberdayaan lembaga kemasayarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat pada APBDes		1,5 Persen	664.831.400,00			1,75 Persen	798.556.200,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan atau Masyarakat Hukum Adat yang telah dibina dan atau dilatih		90 lembaga	664.831.400,00	DAU		120 lembaga	798.556.200,00
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	1 dokumen	25.000.000,00	DAU		119 dokumen	121.615.900,00
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	0 unit	0,00	DAU		256 unit	35.779.200,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	23.635.900,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		1 laporan	77.525.200,00
	Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Kecamatan	0 lembaga	0,00	DAU		8 lembaga	15.000.000,00
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		1 laporan	15.000.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	10 Kecamatan	1 dokumen	639.831.400,00	DAU		1 dokumen	480.000.000,00
T O T A L						1.048.021.728,00			2.094.261.753,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Jumlah seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 4 program kerja, 1 program rutin yang ada di setiap SKPD dengan 7 kegiatan dan 19 Sub kegiatan serta 3 program sesuai tugas fungsi dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sehingga keseluruhan berjumlah 4 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

Total anggaran untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.468.778.962,00 (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. dibawah.

TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		100 Persen	3.305.847.734,00	DAU		100 Persen	3.587.941.630,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Perencanaan		100 Persen	6.677.500,00	DAU		100 Persen	46.404.900,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	1 Dokumen	2.302.875,00	DAU		1 Dokumen	9.004.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gerung	1 Dokumen	750.000,00	DAU		1 Dokumen	11.272.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gerung	1 Dokumen	1.582.000,00	DAU		1 Dokumen	20.551.900,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gerung	1 Dokumen	2.042.625,00	DAU		1 Dokumen	5.576.600,00
	Penataan Organisasi								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kecamatan Gerung	100 Persen	2.939.682.995,00	DAU		100 Persen	3.009.920.830,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		32 Orang	2.907.656.595,00	DAU		40 Orang	2.908.401.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Gerung	60 Dokumen	30.565.375,00	DAU		60 Dokumen	95.366.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gerung	18 Laporan	1.461.025,00	DAU		18 Laporan	6.153.630,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gerung	100 Persen	3.944.650,00	DAU		100 Persen	39.993.100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Gerung	0 Paket	0,00	DAU		40 Paket	7.878.600,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Gerung	0 Paket	0,00	DAU		5 Orang	19.133.700,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gerung	0 Paket	0,00	DAU		20 Orang	3.376.600,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gerung	9 Dokumen	2.554.325,00	DAU		9 Dokumen	4.604.200,00
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Gerung	10 Dokumen	1.390.325,00	DAU		10 Buah	5.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Gerung	100 Persen	35.563.000,00	DAU		100 Persen	29.178.400,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Gerung	1.000 Dokumen	3.720.000,00	DAU		1.000 Dokumen	2.296.200,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gerung	10 Laporan	4.215.000,00	DAU		10 Laporan	5.132.500,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gerung	3 Laporan	27.628.000,00	DAU		3 Laporan	21.749.700,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan			31.661.000,00	DAU		6 unit	88.185.100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kecamatan Gerung	0 Unit	31.661.000,00	DAU		2 Unit	13.185.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kecamatan Gerung	0 unit	0,00	DAU		3 unit	45.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Gerung	0 unit	0,00	DAU		1 unit	30.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gerung	100 persen	149.043.089,00	DAU		100 persen	202.079.500,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gerung	1 Laporan	1.055.825,00	DAU		1 Laporan	24.015.800,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kecamatan Gerung	1 Laporan	36.133.500,00	DAU		1 Laporan	34.063.700,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gerung	1 Laporan	111.853.764,00	DAU		1 Laporan	144.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Jasa Pemeliharaan BMD	Kecamatan Gerung	100 persen	139.275.500,00	DAU		100 persen	172.179.800,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Gerung	26 Unit	95.200.000,00	DAU		26 Unit	160.553.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Kecamatan Gerung	2 Unit	17.537.000,00	DAU		2 Unit	9.004.300,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gerung	25 unit	26.538.500,00	DAU		25 unit	2.622.500,00
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa baru yang telah mendapat kode desa		88 persen	199.999.828,00	DAU		100 persen	124.781.700,00
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang telah ditata sesuai dengan regulasi yang berlaku		105 Desa	199.999.828,00	DAU		119 Desa	124.781.700,00
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Kecamatan	8 desa	199.999.828,00	DAU		8 desa	51.275.500,00
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Kecamatan	0 desa	0,00	DAU		119 desa	13.506.200,00
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10 Kecamatan	119 desa	0,00	DAU		119 desa	15.000.000,00
	Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	10 Kecamatan	0 desa	0,00	DAU		11 desa	15.000.000,00
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Kota	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		1 laporan	15.000.000,00
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	10 Kecamatan	11 unit	0,00	DAU		11 unit	15.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka kerja sama desa		15 persen	0,00	DAU		17,5 persen	42.335.700,00
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah seluruh kegiatan dalam rangka melakukan kerja sama yang dapat terlaksana		7 kegiatan	0,00	DAU		9 kegiatan	42.335.700,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	12.335.700,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10 Kecamatan	1 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu		75 Persen	298.100.000,00	DAU		80 Persen	1.128.588.153,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu		119 desa	298.100.000,00	DAU		119 desa	1.128.588.153,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	11.255.200,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		119 dokumen	6.753.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		119 dokumen	27.278.100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	119 desa	0 dokumen	0,00	DAU		119 dokumen	123.826.400,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Kecamatan	1777 orang	40.000.000,00	DAU		1777 orang	234.198.300,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		119 laporan	5.211.200,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		119 dokumen	9.116.700,00
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	24 Desa	18 laporan	258.100.000,00	DAU		18 laporan	379.063.400,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	196.885.753,00
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		1 laporan	15.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		119 dokumen	15.000.000,00
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Kecamatan	0 orang	0,00	DAU		27 orang	15.000.000,00
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Kecamatan	0 desa	0,00	DAU		1 desa	15.000.000,00
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		1 laporan	15.000.000,00
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase anggaran pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat pada APBDes		1,5 Persen	664.831.400,00			1,75 Persen	798.556.200,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan atau Masyarakat Hukum Adat yang telah dibina dan atau dilatih		90 lembaga	664.831.400,00	DAU		120 lembaga	798.556.200,00
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	1 dokumen	25.000.000,00	DAU		119 dokumen	121.615.900,00
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	0 unit	0,00	DAU		256 unit	35.779.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	23.635.900,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		1 laporan	77.525.200,00
	Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Kecamatan	0 lembaga	0,00	DAU		8 lembaga	15.000.000,00
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10 Kecamatan	0 laporan	0,00	DAU		1 laporan	15.000.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	10 Kecamatan	0 dokumen	0,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	10 Kecamatan	1 dokumen	639.831.400,00	DAU		1 dokumen	480.000.000,00
T O T A L					4.468.778.962,00				5.682.203.383,00

BAB V

PENUTUP

Kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat sama dengan merencanakan kegagalan DPMD Kabupaten Lombok Barat

Renja Perubahan Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat di tahun 2023, Renja Perubahan Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Renja Perubahan Perangkat Daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Perubahan DPMD Kabupaten Lombok Barat untuk optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat di Tahun 2023

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan DPMD Kabupaten Lombok Barat untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan

kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu perencanaan teknis pelaksanaan tiap – tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik dilingkuungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan, dari pelaksanaan renja tahun lalu merupakan modal Berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat di Tahun 2023.

Demikian Renja Perubahan DPMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin... Aamiin YRA.

Gerung, Agustus 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat



M. Ogi Widi. Hakam, S.STP, M.Si
NIK. 197912121998101003

LAMPIRAN



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 190 /DPMD/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
 - b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

†

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);
12. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat;

- b. menyusun Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
- c. menyempurnakan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 menjadi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
- d. menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 menjadi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023; dan
- e. bertanggung jawab terhadap penyelesaian dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

- 1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
- 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/100 / DPMD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2023

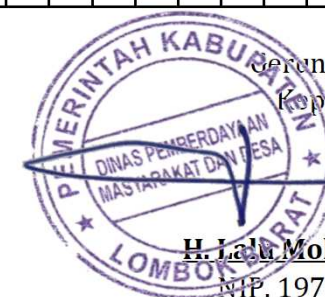
NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat
2.	KETUA	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat
3.	SEKRETARIS	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat
4.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Baratb. Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Baratc. Kepala Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Baratd. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barate. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

TIME SCHEDULE PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DPMD TAHUN 2023

NO.	URAIAN	BULAN																																			
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
I	PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN																																				
1	Penyusunan Rancangan Renja Perubahan																																				
2	Penyampaian Rancangan Renja Perubahan ke Bappeda untuk diverifikasi																																				
	Penyempurnaan hasil verifikasi																																				
II	PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN AKHIR																																				
1	Penyempurnaan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah																																				
2	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Akhir Renja Perangkat Daerah																																				
III	PENETAPAN																																				
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah ke Bappeda untuk verifikasi																																				
2	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah																																				
3	Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah																																				



Gerung, Maret 2023
Kepala Dinas PMD,

H. Laili Moh. Hakam, S.STP, M.Si
NIP. 197912121998101003

**AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023**

NO.	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
I	PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN		
1	Penyusunan Rancangan Renja Perubahan	Minggu III April 2023- Minggu II Mei 2023	Permendagri 86 tahun 2017, pasal 130 ayat 1
2	Penyampaian Rancangan Renja Perubahan ke Bappeda untuk diverifikasi	Minggu II-III Mei 2023	Permendagri 86 tahun 2017, pasal 133
3	Penyempurnaan hasil verifikasi	Minggu IV Mei-I Juni 2023	
II	PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN AKHIR		
1	Penyempurnaan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Minggu III April - Minggu III Juli 2023	Permendagri 86 tahun 2017, pasal 136 dan 137
2	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Akhir Renja Perangkat Daerah	Minggu IV Juli 2023	Permendagri 86 tahun 2017, pasal 138 ayat 2
III	PENETAPAN		
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah ke Bappeda untuk verifikasi	Minggu I Agustus 2023	Permendagri 86 tahun 2017, pasal 139
2	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah	Minggu II-III Agustus 2023	Permendagri 86 tahun 2017, pasal 140 ayat 3
3	Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Minggu IV Agustus 2023	Permendagri 86 tahun 2017, pasal 142



Gempang, Maret 2023
Kepala Dinas PMD,

H. Lalu Moh. Hakam, S.STP, M.Si
NIP. 197912121998101003